

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas penyertaanNya sehingga Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2025 bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Tahun 2025 ini mengacu pada RENSTRA yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun, yang selanjutnya berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah serta untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun RENJA Tahun 2025 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Kupang, 16 April 2024
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan Renja Badan Keuangan Daerah	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun 2022.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah	12
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019.....	27
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
Tabel 2.3	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	14
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	30
Tabel 3.2	Tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	32
Tabel 3.3	Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	35
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Keuangan Daerah	36
Tabel 4.2	Sasaran Badan Prioritas Daerah yang dijabarkan kedalam Sub Kegiatan	44
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/Lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan Rencana Kerja 2025 dengan berpedoman pada Renstra PD, Hasil Evaluasi Hasil Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD Tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai Pedoman Kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategi lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun 2023.

Proses Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada Renstra 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta sejalan dengan visi pembangunan daerah tahun 2024-2026.

Selanjutnya Renja Badan Keuangan Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Renscana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;

- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan Renja Badan Keuangan Daerah

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah merupakan Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi Kewenangan Daerah. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 melaksanakan 2 (Dua) Program dan 13 (Dua Belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan:
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Adapun realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah s/d Tahun 2023

NO	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2023				Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024 berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian		Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*10	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*1	
5	2										
		KEUANGAN									
		Badan Keuangan Daerah									
5	2	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	2	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	2	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
5	2	1	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
5	2	1	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
5	2	1	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	19 Lap	19 Lap	19 Lap	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	2	1	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Lap	4 Lap	4 Lap	
		Percentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
5	2	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									
5	2	1	14 Bulan, 12 Bulan	14 Bulan, 12 Bulan	14 Bulan, 12 Bulan	14 Bulan, 12 Bulan	14 Bulan, 12 Bulan	69 Org/Bln	69 Org/Bln	69 Org/Bln	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
5	2	1	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
5	2	1	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
5	2	1	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

5	2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	1	1	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	2	1	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	1	5	3	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	2	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	2	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar
5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Dok	4 Dok	4 Dok
5	2	1	1	6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	2	1	1	6	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Unit	2 Unit	2 Unit
5	2	1	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	1	1	9		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
5	2	2	1			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketuntasan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok
5	2	2	1	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok	39 Dok
5	2	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok
5	2	2	1	2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketuntasan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	1	2	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok
5	2	2	1	2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok
5	2	2	1	2	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
5	2	2	1	2	6	Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	2	1	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

5	2	2	1	3	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Percentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	1	3	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
5	2	2	1	3	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	3	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	2 Dok
5	2	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	3 Dok
5	2	2	1	3	Koordinasi Pelaksanaan Pitung dan Uang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pitung dan Uang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	48 Dok
5	2	2	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Percentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	2	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap
5	2	2	1	4	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	3 Lap
5	2	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
5	2	2	1	5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Percentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	2	2	1	5	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	2	1	5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap
5	2	2	1	5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Lap	2 Lap	2 Lap
5	2	2	1	5	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Dok	30 Lap	30 Lap	30 Lap
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	3	1	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	2	3	1	1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Perubahan 2018-2023 adalah Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan dengan target 100 % setiap tahun. Berikut adalah Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan Daerah:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai Target/ Standard (IKU, SPM, IKK)	Target Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas aparatur pengelola keuangan daerah.
4. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
5. Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Keuangan Daerah. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Badan Keuangan Daerah

NO			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			BADAN KEUANGAN DAERAH				903.636.505.097,00					903.636.505.097,00	
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.589.916.013,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14.589.916.013,00	
5	2	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	549.124.392,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	549.124.392,00	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	76.772.592,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	76.772.592,00	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	55.351.800,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	55.351.800,00	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	67.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	67.000.000,00	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	50.000.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kupang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	50.000.000,00	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Kota Kupang	Jumlah Data Statistik Sektor	1 Data	150.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Kota Kupang	Jumlah Data Statistik Sektor	1 Data	150.000.000,00	

5	2	1	01.02	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	150.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	150.000.000,00
				Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah		Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	9.198.052.549,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah		Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	9.198.052.549,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kupang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	6.950.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kupang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	6.950.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	2.037.106.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	2.037.106.600,00
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	81.945.949,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	81.945.949,00
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	25.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	25.000.000,00
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	26.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	26.000.000,00
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	30.000.000,00
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	18 Lap	24.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	18 Lap	24.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	24.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	24.000.000,00

5	2	1	01.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Kupang	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	16.000.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	16.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kupang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kupang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5.000.000,00
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	11.000.000,00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kupang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	11.000.000,00
5	2	1	01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	167.000.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	167.000.000,00
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	40.000.000,00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	40.000.000,00
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	19.000.000,00	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kupang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	19.000.000,00
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Kupang, DKI Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	68.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Kupang, DKI Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	68.000.000,00
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Kupang, DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	40.000.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kupang, DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	40.000.000,00
5	2	1	01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	370.473.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	370.473.000,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi : 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama.

Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPD NTT Tahun 2024-2026 Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. **Tolok ukur dan target kinerja.** Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. **Optimalisasi Belanja.** Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka perencanaan dan penganggaran telah menggunakan e-

planning dan e-budgeting. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.

3. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai.

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten yaitu :

- a. Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.
 - b. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai yaitu :
- a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
 - b. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah yang hendak dicapai diatas, maka dapat dievaluasi capaian kinerja untuk dapat menjawab hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
2. Meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsive terhadap lingkungannya.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD (OUTCOME)
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	• Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS. • Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS. • Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD. • Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD. • Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu. • Persentase Perangkat Daerah dengan

					realisasi belanja diatas 80%. • Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT. • Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran. • Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. • Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD.
				Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	• Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP. • Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu. • Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perubahan APBD secara tepat waktu. • Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu. • Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
2.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional,			Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

	Handal dan Berkompeten			Perangkat Daerah	
				Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3.	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai			Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
				Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi

Sumber : Renstra Badan Keuangan Daerah 2024-2026

Tabel 3.2 Tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2025
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%
		Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	95%
		Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	95%

		Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	65%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	100%
		Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%
		Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	95 %
	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	60%
		Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%
	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	60%
		Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	75%

Sumber : Renstra Badan Keuangan Daerah 2024-2026

Tabel 3.3 Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2025
Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan KUA-PPAS	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%
	Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	95%
	Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	95%
	Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	65%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%
	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	100%
Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	100%
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	100%
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	100%

	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%
	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	95%
Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	60%
Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.	Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	60%
	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	75%

Sumber : Renstra Badan Keuangan Daerah 2024-2026

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	IKU	Target Kinerja IKU
1.	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan..	100%
2.	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu: 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; 4. Reformasi birokrasi. Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan indikator kinerja Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan Tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Provinsi NTT 2024-2026 yaitu EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS yang mana pemerintah daerah harus melakukan pengembangan rantai nilai ekonomi lokal, penguatan system ekonomi masyarakat, sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat, ketersediaan dan pemantapan infrastruktur, pencapaian dan pemenuhan SPM.

Hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Keuangan Daerah

No.	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Sasaran 1 : . Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
2	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal.	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
		Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
		Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
3	Sasaran 3 : Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Sasaran 4 : Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
5	Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
6	Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu ada 2 (dua) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan beserta 74 sub kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam tahun 2024-2026. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
2. **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
 - b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
 - d. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - e. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - f. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
 - g. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

- h. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 - i. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
 - j. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - k. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- 3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - e. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
 - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
 - f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

Jumlah keseluruhan Pagu Indikatif Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.903.636.505.097,- dengan prakiraan maju tahun 2026 sebesar Rp.933.818.323.909,19,- Prakiraan maju pagu indikatif pada tahun anggaran 2026 lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2025 disebabkan atas dasar beberapa perhitungan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dibahas pada tahap perencanaan. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan yang lain-lain bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Berikut disajikan Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan.

Penjelasan terkait Prioritas Daerah yang dijabarkan ke setiap sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Prioritas Daerah yang dijabarkan kedalam Sub Kegiatan

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	pagu Indikatif	Ket.
			(Rp.)	
BADAN KEUANGAN DAERAH			903.636.505.097,00	
1.	PD 1: Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	889.046.589.084,00	
		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.343.408.208,00	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	429.638.827,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	466.829.911,00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	50.000.000,00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	108.634.301,00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	346.365.822,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.548.972.669,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.222.252.738,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.020.713.940,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	30.000.000,00	
	Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.066.000.000,00	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	169.000.000,00	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	538.000.000,00	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	508.000.000,00	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	509.000.000,00	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	570.000.000,00	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	100.000.000,00	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	237.000.000,00	
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	71.000.000,00	

	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	72.000.000,00	
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	115.000.000,00	
	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.390.024.088,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	502.000.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	480.000.000,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	374.874.696,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	332.274.696,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	570.874.696,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	130.000.000,00	
	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.444.473.819,00	

		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	146.845.517,00	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	160.000.000,00	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	309.457.002,00	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	155.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.502.171.300,00	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	71.000.000,00	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	
		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	872.802.682.969,00	
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	210.686.490.448,00	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000,00	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	640.116.192.521,00	
02.00	PD 2 : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	108.000.000,00	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.000.000,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.000.000,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	
03.00	PD 3 : Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	304.820.000,00	
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.000.000,00	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	

	aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000,00	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000,00	
		Pengadaan Mebel	10.500.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000,00	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.820.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	
04.00	PD 4 : Reformasi Birokrasi	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.177.096.013,00	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	549.124.392,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.772.592,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	55.351.800,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.000.000,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.198.052.549,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.950.000.000,00	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600,00	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.945.949,00	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.000.000,00	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	24.000.000,00	

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24.000.000,00	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.000.000,00	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.473.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.473.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.446.072,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.100.446.072,00	

Berikut dijelaskan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2026.

**Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
BADAN KEUANGAN DAERAH									
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903.636.505.097,00			100%	935.652.882.605,48
5	2	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.589.916.013,00	PAD		100%	15.150.572.199,64
					549.124.392,00	PAD		100%	548.629.100,00
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.772.592,00	PAD		3 Dok	30.000.000,00
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55.351.800,00	PAD		4 Dok	80.000.000,00
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.000.000,00	PAD		19 Lap	90.000.000,00
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	PAD		4 Lap	48.629.100,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	150.000.000,00	PAD	Arahan dari Bappeda untuk menambahkan Sub Kegiatan ini	1 Data	150.000.000,00
			Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	150.000.000,00	PAD		1 Dok	150.000.000,00

Berikut dijelaskan rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2026.

**Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Pagu/Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
BADAN KEUANGAN DAERAH									
5 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	14.589.916.013,00	PAD		100%	15.150.572.199,64
5 2 1 01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	549.124.392,00	PAD		100%	548.629.100,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	3 Dok	76.772.592,00	PAD		3 Dok	30.000.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	4 Dok	55.351.800,00	PAD		4 Dok	80.000.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	19 Lap	67.000.000,00	PAD		19 Lap	90.000.000,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kupang	4 Lap	50.000.000,00	PAD		4 Lap	48.629.100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Kota Kupang	1 Data	150.000.000,00	PAD	Arahan dari Bappeda untuk menambahkan Sub Kegiatan ini	1 Data	150.000.000,00
	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Kupang	1 Dok	150.000.000,00	PAD		1 Dok	150.000.000,00

5	2	1	01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	9.198.052.549,00	PAD,DAU	100%	9.404.404.058,64
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kupang	69 orang/bulan	6.950.000.000,00	DAU	69 orang/bulan	7.050.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Kupang	1 Dok	2.037.106.600,00	PAD	1 Dok	2.037.106.600,00
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota	5 Dok	81.945.949,00	PAD	1 Dok	100.000.000,00
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kupang	1 Dok	25.000.000,00	PAD	1 Dok	67.297.458,64
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kupang	1 Lap	26.000.000,00	PAD	1 Lap	50.000.000,00
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Kupang	3 Dok	30.000.000,00	PAD	3 Dok	40.000.000,00
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Kupang	18 Lap	24.000.000,00	PAD	18 Lap	30.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Kupang	2 Dok	24.000.000,00	PAD	2 Dok	30.000.000,00
5	2	1	01.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	16.000.000,00	PAD	100%	15.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Kupang	1 Dok	5.000.000,00	PAD	1 Dok	5.000.000,00
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kupang	1 Lap	11.000.000,00	PAD	1 Lap	10.000.000,00
5	2	1	01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	167.000.000,00	PAD	100%	235.000.000,00
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kupang	1 Dok	40.000.000,00	PAD	1 Dok	80.000.000,00
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Kupang	1 Dok	19.000.000,00	PAD	1 Dok	30.000.000,00

				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Kupang, DKI Jakarta	15 Orang	68.000.000,00	PAD	15 Orang	75.000.000,00
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kupang, DKI Jakarta	10 Orang	40.000.000,00	PAD	5 ASN	50.000.000,00
5	2	1	01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	370.473.000,00	PAD	100%	623.707.569,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	5.000.000,00	PAD	1 Paket	10.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	5.000.000,00	PAD	1 Paket	10.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	80.473.000,00	PAD	1 Paket	108.707.569,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Kupang	4 Dok	25.000.000,00	PAD	4 Dok	30.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	85.000.000,00	PAD	1 Paket	145.000.000,00
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Kupang	2 Lap	65.000.000,00	PAD	2 Lap	140.000.000,00
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	2 Lap	95.000.000,00	PAD	2 Lap	150.000.000,00
				Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Kupang	1 Dok	10.000.000,00	PAD	1 Dok	30.000.000,00
5	2	1	01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	27.000.000,00	PAD	100%	45.000.000,00
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Kupang	1 Paket	10.500.000,00	PAD	1 Paket	15.000.000,00
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Kupang	2 Unit	16.500.000,00	PAD	3 Unit	30.000.000,00
5	2	1	01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	4.000.446.072,00	PAD	100%	4.012.011.472,00
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	2 Lap	25.000.000,00	PAD	2 Lap	36.565.400,00

					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kupang	2 Lap	875.000.000,00	PAD		2 Lap	875.000.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kupang	2 Lap	3.100.446.072,00	PAD		2 Lap	3.100.446.072,00
5	2	1	01.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	261.820.000,00	PAD		100%	266.820.000,00
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Kupang	7 Unit	236.820.000,00	PAD		7 Unit	236.820.000,00
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Kupang	10 Unit	10.000.000,00	PAD		10 Unit	10.000.000,00
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Kupang	2 Unit	15.000.000,00	PAD		2 Unit	20.000.000,00
5	2	2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		100%	889.046.589.084,00	PAD		100%	920.502.310.405,84
5	2	2	01.01		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		100%	8.343.408.208,00	PAD		100%	8.593.907.624,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kota Kupang	2 Dok	429.638.827,00	PAD		2 Dok	429.638.827,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Kota Kupang	2 Dok	466.829.911,00	PAD		2 Dok	416.832.911,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang	39 Dok	50.000.000,00	PAD		39 Dok	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang	39 Dok	50.000.000,00	PAD		39 Dok	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang	39 Dok	108.634.301,00	PAD		39 Dok	108.634.301,00
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Kota Kupang	39 Dok	346.365.822,00	PAD		39 Dok	346.365.822,00
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Kupang, DKI Jakarta	2 Dok	2.548.972.669,00	PAD		2 Dok	2.738.972.669,00

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Kota Kupang, DKI Jakarta	2 Dok	3.222.252.738,00	PAD		2 Dok	3.072.749.154,00
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Kupang	9 Dok	1.020.713.940,00	PAD		9 Dok	1.260.713.940,00
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Kupang	2 Dok	40.000.000,00	PAD		2 Dok	40.000.000,00
				Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Kupang	2 Dok	30.000.000,00	PAD		2 Dok	40.000.000,00
				Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Kupang	2 Dok	30.000.000,00	PAD		2 Dok	40.000.000,00
5	2	2	01.02	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase		100%	3.066.000.000,00	PAD		100%	3.164.000.000,00
					Ranperda APBD							
					Kabupaten/Kota							
					yang difasilitasi tepat							
					waktu							
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Kota Kupang	1 Lap	169.000.000,00	PAD		1 Lap	170.000.000,00
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	22 Lap	538.000.000,00	PAD		22 Lap	539.000.000,00
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	22 Lap	508.000.000,00	PAD		22 Lap	510.000.000,00
				Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Kupang	22 Lap	509.000.000,00	PAD		22 Lap	510.000.000,00
				Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	Kota Kupang	5 Dok	570.000.000,00	PAD		5 Dok	570.000.000,00

					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Kupang, DKI Jakarta	2 Dok	1.502.171.300,00	PAD		2 Dok	1.602.171.300,00
					Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Kupang	1 Dok	71.000.000,00	PAD		1 Dok	50.000.000,00
					Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Kupang	39 Orang	100.000.000,00	PAD		39 Orang	110.000.000,00
5	2	01.05	2		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan		100%	872.802.682.969,00	PAD, DBH, DAU		100%	903.826.046.395,55
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Kupang	1 Lap	210.686.490.448,00	PAD		1 Lap	200.124.121.804,00
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kab/Kota	1 Lap	2.000.000.000,00	PAD		1 Lap	2.000.000.000,00
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kab/Kota	2 Lap	20.000.000.000,00	PAD, DBH, DAU		2 Lap	20.000.000.000,00
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Semua Kab/Kota	30 Lap	640.116.192.521,00	PAD		30 Lap	681.701.924.591,55

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

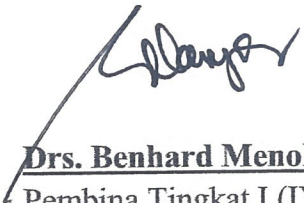
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 pada Badan Keuangan Daerah dan sebagai dasar evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2024.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 akan tetap mempertimbangkan ketersediaan keuangan daerah dan akan dilakukan perubahan rencana kerja jika diperlukan.

Kupang, 16 April 2024

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

9


Drs. Benhard Menoh, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720512 199101 1 001